

Pebandingan Implementasi E-Government Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan E-Government)

Miya Monika Wau¹, Timbul Dompok²

¹Mahasiswa program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

Email:pb231010024@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This article's goal is to contrast Singapore's and Indonesia's approaches to e-government adoption. Comparing e-Government destinations' web designs is the goal of this study. Singapore has a website (www.gov.sg), while Indonesia has a website (www.Indonesia.go.id). The work area thinking and information collecting approach will be used to acquire this data. delivering data to the library so it may be transformed into research materials. The study's conclusion is that, in the present age of the industrial revolution, government operations will be significantly impacted by the implementation of e-Government. Every government implements things differently. a technique made possible by developments in ICT (information and communication technology). The process of implementing e-Government in Indonesia and Singapore is done by implementing e-Government in each nation separately. corresponding areas, both in terms of managing government operations internally and disseminating information to the general public.

Keywords: E-Government, Implementation, Indonesia, Singapore

PENDAHULUAN

Saat ini, seiring kemajuan teknologi, bermunculan metode-metode baru dan kreatif dalam menyajikan informasi melalui teknologi serba digital, sehingga pengetahuan semakin mudah diperoleh. Hal ini memungkinkan untuk mengukur kemajuan suatu negara dan pembangunan teknis. Diantaranya adalah manajemen dan manajemen berbantuan teknologi. suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki masyarakat dan pemerintahan secara internal. Sejumlah hal perlu dipersiapkan, seperti peran pengambilan keputusan, tata kelola, manajemen risiko selama instalasi sistem, dan komponen keamanan sistem yang sedang diterapkan. (Negeri Oracle, Maulana).

Penggunaan e-Government adalah pendekatan sederhana untuk memperbarui administrasi publik di zaman sekarang ini. Pemerintah Indonesia terpaksa menerapkan e-Government karena adanya kemajuan teknis saat ini.

E-Government adalah penyebaran informasi pemerintah kepada publik melalui penggunaan teknologi online, yang memfasilitasi transmisi informasi yang sudah ada. Dan e-Government saat ini sedang diterapkan oleh sejumlah besar kementerian dan lembaga. Karena tingginya biaya pengembangan e-Government, penerapan strategi e-Government yang sukses dan

pencapaian tujuan strategis e-Government memerlukan siklus perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, dan penilaian pengembangan e-Government yang sesuai. Oleh karena itu, agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, alokasi anggaran untuk pengembangan e-Government harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Dunn dan Data (2006)

Melalui Kementerian Peralatan dan Penguatan Nasional (PANRB), Indonesia berupaya untuk lebih meningkatkan implementasi Sistem Elektronik e-Government (SPBE) yang sering disebut e-Government dalam rangka mendukung pelayanan publik.

Singapura memiliki kerangka kerja yang kuat dalam mengadopsi SPBE dan menduduki peringkat ketujuh di dunia dalam penerapan e-Government. Mempekerjakan karyawan adalah langkah pertama dalam menciptakan SPBE yang sukses di Singapura. Menarik pekerja yang kompeten untuk membantu pemerintah dan perekonomian, dengan fokus pada sektor teknologi. Civil Service College memberikan pelatihan bagi mereka yang meninggalkan pekerjaan lamanya di Singapura untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (ASN) (CSC). Selain itu, Lionland melakukan pencarian bakat dan pencarian bakat berdasarkan kebutuhan.

Perkembangan terkini pemanfaatan inovasi informasi penerbitan Kartu Pekerja Indonesia

(KPIS) Singapura dan Kartu Pelaut akan ditampilkan KBRI Singapura. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menjamin pendidikan dan keterampilan, memungkinkan sistem pemantauan, memantau kegiatan, dan memastikan penduduk Indonesia mendapatkan gaji yang wajar.

Pengertian e-Government

Penggunaan ICT (informasi, komunikasi, dan teknologi) sebagai alat untuk mendorong interaksi dan komunikasi antara individu, organisasi perusahaan, lembaga pemerintah, dan stafnya dikenal sebagai e-Government, menurut Bank Dunia (2004). mengusulkan suatu prosedur.

Dalam Achmad Djunaedi (2002), Heeks mendefinisikan e-Government sebagai penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi, atau ICT, dengan tujuan sebagai berikut: Sangat baik untuk membantu kepemimpinan. BENAR. Selain itu, berikut penjelasan mengenai e-Government:

- 1) manajemen elektronik Mengurangi pengeluaran, mengelola pameran, berkolaborasi secara strategis dengan pemerintah, dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan prosedur pemerintah.
- 2) Kewarganegaraan Daring dan Tata Kelola Daring Dengan melibatkan masyarakat, mendorong akuntabilitas, memberikan perhatian kepada masyarakat, mendorong demokrasi, dan memperkuat koordinasi pemerintah, kita akan meningkatkan masyarakat dan pemerintahan.
- 3) Komunitas Digital membina hubungan dengan entitas di luar pemerintah, termasuk meningkatkan kerja sama dengan sektor korporasi, mendorong pembangunan sosial, membina kerja sama dengan pemerintah, dan memperkuat masyarakat sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif yang digabungkan dengan penelitian subjektif. Untuk dapat menjalin hubungan antara subjek penelitian dengan fenomena sosial lainnya, maka perlu diselidiki sifat gejala dan indikasi yang sebenarnya, sebagaimana dikemukakan Surachmad dalam Nurmandi & Purnomo, 2011.

Informasi ini dikumpulkan dari studi literatur, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang menyediakan makalah dan kesimpulan dari berbagai pemerintahan dan otoritas lain yang menggambarkan keadaan seputar masalah penelitian (Hasan, 2002).

Dokumentasi data menjadi landasan strategi pengumpulan data penelitian ini. Pengumpulan Sumber Dokumenter. alat cadangan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kajian penelitian, jurnal, artikel, seminar, karya profesional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan kajian. Catatan harian implementasi pemerintah Singapura dan Indonesia. Keduanya menunjukkan bagaimana destinasi online membantu e-Government membangun kehadirannya di wilayah perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tata Kelola Elektronik di Indonesia Praktik penggunaan teknologi online untuk mendistribusikan informasi secara publik guna memfasilitasinya dikenal sebagai e-Government. Saat ini, e-Government digunakan di berbagai sektor pemerintahan. Pada kenyataannya, e-Government adalah proses penggunaan Internet untuk melaksanakan tugas resmi dan meningkatkan administrasi publik untuk kepentingan masyarakat. Untuk menjamin tersedianya sarana komunikasi dan informasi yang dapat diakses dengan cepat di kantor-kantor pemerintah dan lembaga pendidikan, Pemerintah Pusat membentuk Direktorat Komunikasi dan Informatika (Depkominfo).

Selanjutnya, peraturan yang mengatur semua layanan pemerintah di tingkat federal dan daerah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika (2003) menetapkan pedoman yang mengatur pembangunan infrastruktur portal pemerintah, pengelolaan suspensi e-pemerintah, rencana pengembangan e-pemerintah, peraturan TIK untuk mendukung penerapan e-pemerintah, dan pelaksanaan pemerintahan daerah. -target web pemerintah pemerintah. Untuk membantu e-Government, pemerintah Indonesia telah menetapkan empat tujuan. RPJMN 2015–2019 memuat banyak listing. Kurangi jumlah ruang kosong dengan menggabungkan 80% distribusi radio dan televisi dengan 100% konektivitas Internet dan telekomunikasi. Dengan backbone optik, 497 ibu kota kabupaten/kota memiliki konektivitas web berkecepatan tinggi yang menjangkau 71% (20%) layanan broadband dan 10% (1%) penyedia broadband. (3) Ketersediaan Phantom broadband seluler (LTE) pada 500 MHz. (4) membangun sistem pemerintahan yang terintegrasi atau menggunakan TIK untuk menghubungkan seluruh lembaga pemerintah (BAPPENAS, 2015). Purnomo dan Salasavilla (2017).

Tujuan dari aplikasi web atau situs web yang menawarkan layanan elektronik mencakup

prosedur penyesuaian. Integrasi antara G2G, G2B, dan G2C menjadi penekanan utama penerapan fase penggunaan. Level tersebut dicapai gabungan pemerintah dan tiga pemerintah kabupaten/kota yakni Kabupaten Kalanganyar, Kabupaten Gresik, dan Jawa Tengah. Untuk informasi umum, masyarakat Indonesia dapat mengunjungi situs resmi negaranya, www.Indonesia.go.id. Berbagai macam informasi yang dipilih dengan cermat tentang Indonesia tersedia di halaman ini, termasuk rincian tentang lagu dan bahasa nasional, peraturan, kementerian, presiden dan wakil presiden, peta, parlemen, sistem pemerintahan, dan agama. Cari tahu tentang profil dan berita. Data dan statistik Indonesia, suku, dan pemerintahan daerah (Portal Informasi Indonesia INDONESIA.GO.ID).

Berita nasional yang dimuat di situs tersebut mengutip budaya, seni, keanekaragaman hayati, barang, pariwisata, dan masakan sebagai contohnya. Standar administrasi mencakup yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, keuangan, kependudukan, perdagangan, investasi, dan bea cukai. "Afinitas"—lebih banyak fitur—ditambahkan sehubungan dengan situs web report.go.id. Masih belum mudah diaksesnya situs web tempat pengaduan yang belum terselesaikan harus dikirimkan.

Menurut UNDESA (2014), Indonesia berada di posisi tengah dalam hal e-Government. Dewi (2011) melakukan studi kasus yang menunjukkan efektivitas penerapan e-Government di kota-kota wilayah Yogyakarta. Namun, kota ini memiliki sumber daya, lahan, dan teknologi yang terbatas. (2017) Sutopo dkk.

Implementasi e-government di Singapura

Untuk memposisikan pemerintah Singapura saat ini sebagai pengguna utama inovasi informasi, pengembangan e-Government dimulai pada tahun 1980. Rencana pembangunan infrastruktur jaringan teknologi komunikasi telah ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Tiga yang pertama adalah IT 2000 pada tahun 1992, Perjanjian TI Nasional pada tahun 1986, dan Program Informatisasi Pelayanan Publik pada tahun 1981.

Pemerintahan Singapura selalu diperiksa untuk memperbaiki kondisinya saat ini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang efektif dapat meningkatkan nilai perusahaan (Christopher, Jesslyn, Leonardi, ND).

Dengan terbentuknya Badan Pengembangan Informasi dan Komunikasi atau Komite Badan Informasi dan Komunikasi, program

pengembangan TIK ini telah berjalan sekitar 20 tahun. Dengan tujuan menjadi negara yang dapat dihubungkan dengan pulau kabel atau jaringan telekomunikasi, pemerintah Singapura kini mulai berkembang secara formal sebagai e-Government.

Ada tiga fase yang membentuk implementasi program Singapore ONE. Oleh karena itu, kursus inti manajemen dan pengembangan kerangka kerja ditawarkan sebagai kursus perdana pada tahun 1996–1997. Kemudian, antara tahun 1998 dan 2002, modifikasi pertama terhadap kerangka kerja yang dibangun dilaksanakan. Pertumbuhan sektor jaringan online, serta pengenalan beberapa aplikasi dan manajemen, merupakan topik utama lainnya dari magang ini. Pemerintah Singapura akhirnya mulai menerapkan teknologi ini pada tahun 2002, sehingga tersedia untuk digunakan di rumah, tempat kerja, dan lingkungan pendidikan. Seperti yang dikatakan Khalid pada tahun 2015.

Pemerintah Singapura telah membentuk kelompok informasi dan manajemen dan mengadopsi metodologi yang menggambarkan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat. Jendela informasi dan manajemen online khusus yang disusun secara logis berdasarkan kategori ini tersedia melalui Portal E-Citizen. Saat ini melayani 1.700 dari 2.600 departemen federal secara online adalah Electronic Citizenship Center. Selain itu, perkembangan teknologi yang fleksibel telah membuat administrasi pemerintahan lebih mudah diakses dengan memungkinkan akses internet melalui perangkat portabel. Penduduk dapat membayar denda, mengajukan izin, membayar pajak, mendapatkan informasi tentang fasilitas terdekat, dan menerima pamflet pemerintah melalui situs web. (Dewindle dan Beam, 2003).

Singapura memiliki banyak versi online dari administrasi yang terintegrasi secara dinamis. Pada tahun 2001, Singapura berhasil mentransisikan 92% dari seluruh lembaga pemerintah ke internet.

Berdasarkan penelitian komparatif (Prihanto, 2013), Singapura mengutamakan e-Government di atas sumber daya manusia untuk perusahaan telekomunikasi. Di antara negara-negara dengan peringkat terbaik untuk elemen e-Government adalah Singapura. Hal ini menunjukkan betapa e-Government berkembang lebih cepat dan efektif di negara ini dibandingkan negara lain. Akses masyarakat terhadap administrasi Web 2 di Singapura menjadi alasan pencapaian ini. dapat diakses melalui platform cloud untuk komunikasi dan tugas administratif

online lainnya seperti perizinan dan pembayaran biaya.

Perbandingan e-government Singapura dan Indonesia

Perkembangan e-Government di Indonesia Sebanding. Berdasarkan penelitian (Yunita & Aprianto, 2018), 34 tujuan telah tercapai dari sampel 548 kotamadya di 34 wilayah. Itu tidak dapat diakses karena beberapa alasan. Misalnya, mungkin ada kesalahan server, masalah koneksi database, atau pemeliharaan yang terjadi di situs web.

Saat ini, 341 tujuan web/aplikasi dianggap matang. situs web yang melayani banyak kategori media. Email, nomor telepon, jajak pendapat, formulir masukan, percakapan konferensi, SMS, dan obrolan adalah beberapa contoh media interaktif di situs web pemerintah yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan terlibat dengan beberapa organisasi pemerintah. Ada formulir tambahan yang dapat diakses. Berikutnya sebanyak 115 target atau aplikasi pada tahap integrasi dan 4 pada tahap penggunaan. Alhasil, Sistem Pemerintahan Elektronik diterapkan oleh pemerintah Singapura (SPBE).

Oleh karena itu, Indonesia kini mempelajari kembali cara merancang dan melaksanakan SPBE/e-Government. Saat ini Singapura menggunakan website ECitizen Entry untuk mendirikan e-Government. Situs web ini dapat digunakan sebagai pintu gerbang, untuk menangani segala jenis data, termasuk akta kelahiran, paspor, dan izin lainnya, serta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan balasan. Karena kurangnya database di situs Masu saat ini dan fakta bahwa tidak semua daerah mengadopsi e-Government untuk administrasi administrasi, situs bilateral terus menimbulkan masalah di Indonesia. Masalah khusus ini tidak terjadi di setiap lokasi situs.

Masyarakat di Singapura akan terpaksa memproses akta kelahiran dan paspor mereka secara online karena penerapan e-Government. Pemohon akan dikenakan konsekuensi jika tidak hadir, dan dalam hal ini, ia tetap harus mengajukan permohonan secara online atau elektronik. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, Indonesia telah menerapkan e-Government di sejumlah sektor penting. Karena e-Government masih dalam tahap awal pengembangan di Indonesia dan belum diterapkan di banyak lokasi, maka keterlibatan masyarakat di dalamnya semakin meningkat. Terlebih lagi, web lokal Singapura diciptakan jauh lebih awal dibandingkan Indonesia. Sebagai hasilnya, kita sekarang dapat membicarakan

tentang penerapan yang lebih baik sehingga masyarakat dapat menerapkannya dengan lebih sukses.

Kendala yang dihadapi

Menurut Retnowati, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi seberapa baik implementasi e-Government. Apa prioritas utama masyarakat di negara atau wilayah Anda saat ini? Pemerintah daerah memperluas tingkat aksesibilitas dan keterhubungan informasi. Masalah terbesar yang dihadapi pemerintah adalah sumber daya manusia. Banyak pejabat pemerintah di Indonesia yang masih belum dapat memanfaatkan kemajuan terkini karena kurangnya keterampilan TI di negara ini.

Tidak adanya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan e-Government, kurangnya komitmen terhadap pertukaran informasi dan pencatatan seluruh informasi, serta penggunaan teknologi mutakhir merupakan hambatan mendasar dalam penerapan e-Government di pemerintahan daerah. Akses terbatas, yayasan mahal dan tidak mencukupi, serta sumber daya manusia terbatas. (Wirawan 2020).

Terdapat kekurangan dalam penerapan e-Government di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh variasi di setiap bidang, seperti politik, sosial ekonomi, pendidikan, pemerintahan, dan sosiologi. Kalau soal pakaian anak, masyarakat Indonesia memang terpecah belah.

Peran e-government

Dalam pasar yang kompetitif saat ini, penyediaan layanan yang transparan sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Persyaratan kegunaan mencakup besarnya setiap indikasi yang dianalisis, dan administrasi merupakan komponen penting karena administrasi dapat berupa kebijakan, anggaran, dan tenggat waktu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar administrasi publik dan menjadikannya lebih terintegrasi secara global. Kementerian Pendidikan Umum dan Reformasi Birokrasi, misalnya, terlibat dalam kampanye hubungan masyarakat di banyak bidang.

Digitalisasi kegiatan pemerintahan merupakan hal yang penting. "Manajemen publik yang baru sudah mati," bahkan menurut seorang profesor politik dan kebijakan publik di London School of Finance and Political Science (LSE). Pemerintahan di era digital akan tetap ada. Kehadiran sistem manajemen elektronik ini membuka sejumlah pilihan. meningkatkan administrasi publik, memotong pengeluaran, meningkatkan minat terhadap solusi e-

Government terbuka, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. (Harjaloka, 2014).

Di sisi lain, pemerintah mendukung penyedia layanan dalam menerapkan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan standar pelayanan masyarakat seiring dengan perkembangannya. Pemerintah kini berupaya membangun e-Government, yang mengacu pada layanan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk memfasilitasi penggunaan jaringan komputer, teknologi informasi, dan teknologi e-Government dalam pengelolaan sistem pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik kecil, adalah kerangka ini. Jika dibandingkan dengan sistem e-Government dengan sistem demokrasi yang sudah ada, tampaknya sistem ini mempunyai beberapa manfaat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kolaborasi antar otoritas melalui internet dan komunikasi antara sektor publik dan komersial.

mengkomunikasikan nilai digitalisasi dalam proses pemerintahan. Umur panjang pemerintahan di era digital telah berakhir, menurut seorang profesor politik dan kebijakan publik di London School of Finance and Politics (LSE). Akan ada beberapa langkah kebijakan sebagai konsekuensi dari keberlanjutan sistem e-Government ini. Hal ini termasuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas, memotong pengeluaran, meningkatkan layanan, khususnya layanan publik, dan mungkin meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif e-Government.

SIMPULAN

Pemerintah menciptakan e-Government sebagai cara untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat dan memudahkan mereka mengakses informasi dan layanan, yang semuanya mendukung pemerintahan nasional yang transparan dan efektif.

Meskipun jumlah sistem e-Government di Indonesia semakin banyak, namun kualitasnya masih belum memadai karena penerapan e-Government belum merata di seluruh wilayah. Saat ini Indonesia hanya bisa menyediakan data statis. Untuk meningkatkan kualitas, pemerintah harus berupaya untuk mendorong pertumbuhan e-Government, khususnya terkait infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, peraturan, dan sosialisasi publik dan internal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana fase administrasi pemerintahan revolusi industri saat ini telah terkena dampak

signifikan dari penerapan e-Government. Setiap negara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan pemerintahannya dengan cara yang unik. Penerapan e-Government di tingkat lokal di Indonesia dan Singapura terlihat jelas dalam penggunaannya baik untuk operasional internal pemerintah maupun penyebaran informasi publik.

Karena sistem e-Government Singapura diperkenalkan pada kunjungan Kementerian PANRB ke Singapura, perkembangan e-Government di negara tersebut tertinggal dibandingkan kedua negara tersebut. Gaya penulisan administrasi elektronik dari pemerintah telah mengalami kemajuan yang signifikan. Indonesia merangkul agenda pemerintah Singapura dan pengembangan e-Government untuk memfasilitasi hal ini.

Melalui kemajuan informasi dan komunikasi, sistem e-Government ini dapat membantu pemerintah meningkatkan komunikasi antara lembaga pemerintah, perusahaan pemerintah, dan pemerintah lainnya. Blade juga akan diserap ke dalam agensi. Sebuah rencana yang efisien harus ada dalam penerapan dan penerapan e-Government untuk menjamin bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, terutama dalam menghadapi kemunduran kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hasibuan, Zainal; Harry, B. S. (2005). Standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi Indonesia*, 16424, 42–48.
- A Singapore Government Agency Website. (n.d.). <https://www.gov.sg/> Christopher, Jesslyn, Leonardi, V. (n.d.). Good Governance, Good Citizen. <https://goodgovernanceproject.blogspot.com/2014/04/penerapan-good-governance-disingapura.html>
- Data, B., & Dan, P. (2006). Basis data peraturan dan perundang-undangan. *The program*, 1–14.
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government Di Indonesia Dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35> INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia. (n.d.). <https://www.indonesia.go.id/>

- Maulana, I. (n.d.). Refleksi E-Government Negara Singapura terhadap Perkembangan E-Government Negara Indonesia Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Refleksi E-Government Negara Singapura terhadap Perkembangan E-Government.
- Mira Tania S. (n.d.). Sepuluh Negara dengan Indeks e-Government Tertinggi. <https://miratania.wordpress.com/2014/04/06/sepuluh-negara-dengan-indeks-e-governmenttertinggi-bagian-i/>
- Putri Manurung. (n.d.). Penerapan E-Government di beberapa Negara. <https://putrimanurung09111003026.blogspot.com/2014/09/penerapan-e-government-dibeberapanegara.html>
- Ray, L., & Peter, A. (2003). QUT Digital Repository : study. 5(January), 214–220.
- Resta, A. (2013). Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website kota Semarang). *Journal of Public and Government (e-Journal S-1 Undip)*, 2(4), 126–135. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/3583>
- Salsabila, L., & Purnomo, E. P. (2017). Establishing and Implementing Good Practices E-Government (A Case Study : e-Government Implementation between Korea and Indonesia). *Asian/ Asia Academic Society International Conference (Basic)*, 5, 221–229.
- Slamet, Hamdan², A. R. bin, & Deraman³, ; Aziz. (n.d.). RESTRUKTURISASI DAN REORIENTASI MENUJU PERCEPATAN TARGET E-GOVERNMENT DI INDONESIA. 1–6.
- Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 3.
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>.